

BAB II

EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Visi dan Misi RPJMD

1. Visi

Visi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan rumusan umum yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam RPJMD 2007-2012 adalah :

” JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
- b. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

Pemahaman terhadap visi Jakarta adalah sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*".
- b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima.
- c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.
- d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- e. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Makna misi dimaksud adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*", bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 - i. Partisipasi masyarakat
 - ii. Tegaknya supremasi hukum
 - iii. Transparansi
 - iv. Kesetaraan
 - v. Daya tanggap kepada stakeholders
 - vi. Berorientasi pada visi
 - vii. Akuntabilitas
 - viii. Pengawasan
 - ix. Efektivitas dan efisiensi
 - x. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

- b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi.
- c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas pada pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarah, dan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis.

- d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan keberkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan: pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif.

e. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki “*favorable climate*” untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni:

i. Human

ii. Social

iii. Cultural

iv. Intellectual and Creative

v. Natural

vi. Environmental

vii. Infrastructure

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh aset kota dimaksud.

B. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Angka Harapan Hidup.

Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perkembangan IPM DKI Jakarta selama periode 2007-2008 menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni dari 76,4 pada tahun 2007 meningkat menjadi 76,5 pada tahun 2008. Untuk tahun 2009 IPM DKI Jakarta diperkirakan naik menjadi 76,6. Sementara untuk nasional, IPM naik dari 65,8 pada tahun 2007 menjadi 69,6 pada tahun 2008.

Pengeluaran riil per kapita penduduk mengalami penurunan sebagai dampak dari memburuknya ekonomi makro DKI Jakarta. Tetapi masih bisa diimbangi dengan kemajuan di bidang pendidikan, salah satunya disebabkan adanya program wajib pendidikan dasar sembilan tahun. Harapan ke depan, wajib belajar bagi penduduk DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta meningkat seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Secara nasional IPM DKI Jakarta selama periode 2007-2008 berada di posisi teratas dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, namun hal ini tidak berarti IPM untuk masing-masing wilayah di DKI menempati urutan teratas. Sebagian besar Kabupaten/Kotamadya Administratif di DKI Jakarta mempunyai IPM yang tinggi, kecuali Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan 69,76 (2007). Jika diukur menurut skala internasional, posisi IPM DKI Jakarta berada dalam kategori menengah (66,00–79,99). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan berupa peningkatan kualitas hidupnya.

b. Struktur Ekonomi

Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan lebih dari 100 triliun rupiah, yaitu dari Rp 566,45 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 677,45 triliun pada tahun 2008. Untuk tahun 2009 diperkirakan naik menjadi Rp 756,11 triliun.

Peningkatan PDRB pada tahun 2008, terbesar atau 64,97% dipengaruhi oleh kontribusi tiga sektor utama, yaitu sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 28,56% sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,68%; serta sektor industri pengolahan sebesar 15,73%.

Menurut sektoral, pada tahun 2008 sebesar 71,28 persen PDRB DKI Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, dan jasa), sebesar 28,14 persen berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan dan bangunan), dan hanya sekitar 0,58 persen dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta, sektor jasa (tersier) memiliki peranan sebesar 71,28 persen bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB. Pembentuk sektor tersier meliputi sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 28,56 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,68 persen; dan sisanya diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa lainnya. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta mengarah kepada struktur jasa (*service city*).

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder berkontribusi sebesar 28,14 persen pada PDRB yang terdiri dari sektor industri pengolahan sebesar 15,73 persen, sektor konstruksi sebesar 11,29 persen dan sisanya dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Sementara sumbangan sektor primer di Jakarta hanya sebesar 0,58 persen yang terdiri dari dari sektor pertanian sebesar 0,10 persen dan sektor pertambangan sebesar 0,48 persen.

Dari sisi penggunaan, tahun 2008 sebesar 55,63 persen dari total PDRB digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Komponen penggunaan lainnya yang cukup besar adalah impor barang dan jasa sebesar 55,11%, ekspor sebesar 54,41% serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 35,79%. dan konsumsi pemerintah sebesar 7,07%.

c. Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral

Perekonomian DKI Jakarta pada Tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,2 %, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007. Pertumbuhan ini sebanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 hanya 3,5-4,5% lebih kecil daripada pertumbuhan nasional sebesar 4-5% Penurunan target ini sebagai dampak dari krisis keuangan global yang mengakibatkan perlambatan ekspor dan investasi, pertumbuhan ekonomi secara dominan hanya mengandalkan pada konsumsi domestik dan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apalagi secara sektoral, sektor keuangan mempunyai peran yang besar dalam perekonomian Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral menunjukkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Jakarta) seperti: sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara sektor konstruksi dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Percepatan pertumbuhan sektor konstruksi didorong juga oleh pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti pembangunan BKT, *fly over*, *under pass*, rumah susun dan pembangunan sarana busway, yang semuanya masuk ke dalam *dedicated program*. Demikian pula dengan dan pembangunan pusat-pusat bisnis dan pemukiman elit (apartemen atau kondominium) yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Sektor pengangkutan dan komunikasi dalam kurun 2007-2008 mengalami pertumbuhan fenomenal, yakni mampu tumbuh sekitar 15

persen per tahun. Hal ini disebabkan maraknya penggunaan telepon seluler dan tambahan fitur layanan yang disediakan operator sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan sub sektor komunikasi.

Pada tahun 2008, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 15,0 persen, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 7,7 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor listrik, gas, dan air bersih masing-masing sebesar 6,3 persen, sektor jasa-jasa sebesar 6,0 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 4,3 persen, sektor industri pengolahan sebesar 3,9 persen, sektor pertanian dengan pertumbuhan 0,8 persen, serta sektor pertambangan mengalami pertumbuhan sebesar 0,3 persen.

Sementara dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara dominan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga, ekspor barang dan jasa, serta impor. Pada Tahun 2008 impor mengalami pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 12,8 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto meningkat 8,5 persen, konsumsi pemerintah meningkat 6,8 persen, konsumsi rumah tangga yang meningkat 6,7 persen, dan ekspor yang meningkat 2,2 persen.

Secara umum pengeluaran tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2007 terutama pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi global berdampak pada penurunan ekspor ke luar negeri sebagai akibat daya beli luar negeri yang menurun, perlambatan investasi karena sebagian besar pelaku investasi adalah swasta, serta konsumsi masyarakat yang menurun dan penurunan kinerja industri yang berdampak pada terganggunya kinerja sektor perdagangan.

d. Laju Inflasi

Besaran nilai inflasi kota Jakarta akan sangat mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat inflasi Nasional. Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2007 (SBH 2007) Kota Jakarta mempunyai bobot 22,49%

terhadap nilai inflasi Nasional, sedangkan bobot seluruh ibukota provinsi di Pulau Jawa (selain kota Jakarta) hanya sebesar 17,09%.

Selama lima tahun terakhir inflasi kota Jakarta, masing-masing sebesar 6,40% (2004); 16,06% (2005); 6,03% (2006); 6,04% (2007); dan 11,11% (2008). Sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan 6,50%. Inflasi tahun 2005 sangat tinggi (16,06%) karena dampak kebijaksanaan Pemerintah menaikkan harga BBM pada saat itu. Sedangkan penyebab utama tingginya inflasi kota Jakarta pada tahun 2008 (11,11%) adalah kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM sampai dua kali dan tidak mulusnya pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas.

Kenaikan harga BBM (utamanya Premium dan Solar) pada tahun 2008 yang mencapai lebih dari 33 persen mendorong tingginya inflasi Kota Jakarta karena secara umum pengeluaran untuk transportasi (khususnya angkutan kota) masih merupakan bagian yang besar (4,21 persen) dalam total pengeluaran masyarakat Jakarta, lebih besar dari bobot komoditi beras yang hanya 2,4 persen.

e. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita dapat sebagai gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yakni 38,69 juta rupiah (2003); 42,92 juta rupiah (2004); 48,96 juta rupiah (2005); 55,98 juta rupiah (2006); 62,49 juta rupiah (2007); dan 74,03 juta rupiah (2008).

Jika dihitung selama periode 2003-2008 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar 91,34 persen atau meningkat hampir dua kali lipat. Sedangkan selama periode 2007-2008, pertumbuhan PDRB per kapita adalah sebesar 18,47 persen.

PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan. Dalam periode 2007-2008 pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 5,13 persen.

f. Koefisien Gini

Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2007-2008 menunjukkan penurunan yaitu dari 0,32 pada tahun 2007 menjadi 0,30 pada tahun 2008. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat DKI Jakarta masih dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung pula oleh kriteria ketimpangan Bank Dunia, 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 17 persen total pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan di DKI Jakarta sudah dapat dirasakan oleh sebagian besar penduduk dan khususnya juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi pembangunan DKI Jakarta. Kesejahteraan yang dinikmati oleh semua orang adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah program peningkatan kapasitas penduduk miskin melalui subsidi pendidikan dan kesehatan serta perbaikan infrastruktur dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program penanggulangan kemiskinan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

g. Investasi

ICOR adalah tambahan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output atau nilai tambah. Selama tiga tahun terakhir kinerja investasi di Jakarta semakin menurun efisiensinya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ICOR yang tinggi masing-masing sebesar 4,2 (2006), 4,4 (tahun 2007), dan 5,2 (tahun 2008).

Dari segi kemampuan investasi, Pemda DKI Jakarta memiliki kemampuan investasi yang lebih besar di tahun 2008 sebesar 8,5 triliun rupiah dibanding tahun 2007 sebesar 7,9 triliun rupiah. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan peranan investasi Pemda DKI Jakarta

terhadap investasi total yang mengalami penurunan dari 3,8 persen di tahun 2007 menjadi 3,5 persen di tahun 2008.

h. Kunjungan Wisatawan Asing

Selama tahun 2007, jumlah wisatawan asing (Wisman) yang berkunjung ke Jakarta ada sebanyak 1,1 juta kunjungan. Untuk tahun 2008, sampai dengan bulan November 2008, kunjungan Wisman ke Jakarta sudah mencapai 1,38 juta kunjungan. Hal ini berarti bahwa kunjungan Wisman ke DKI Jakarta pada tahun 2008 meningkat sebesar 24,77 persen dibanding tahun 2007 dan telah melampaui target yang ditetapkan pada RKPD 2008 sebesar 1,27 juta kunjungan.

i. Jumlah Penduduk

Penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan penduduk yang tidak mempunyai KTP DKI Jakarta. Jumlah penduduk yang dilaporkan adalah penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta, tidak memperhatikan apakah penduduk tersebut mempunyai KTP DKI Jakarta atau tidak.

Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2007 sebanyak 9.057.993 jiwa (4.517.514 laki-laki dan 4.540.479 perempuan) dan tahun 2008 sebanyak 9.146.181 jiwa (4.491.392 laki-laki dan 4.654.789 perempuan).

Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta periode 1990 - 2000 sebesar 0,16 persen per tahun dan periode tahun 2005-2008 pertumbuhannya meningkat menjadi 0,94 persen per tahun.

Dengan luas wilayah 661,62 km² , kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2008 adalah 13.824 jiwa per km² . Wilayah dengan penduduk terpadat adalah Kota Administratif Jakarta Pusat dengan 18.683 jiwa per km² dan wilayah dengan penduduk terjarang adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan kepadatan 2.144 jiwa per km².

j. Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007 (Pebruari 2007), jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta ada sebanyak 405,7 ribu orang atau 4,48 persen. Berdasarkan survei yang sama pada tahun 2008, penduduk miskin di DKI Jakarta ada sebanyak 379,6 ribu orang atau 4,29 persen. Hal ini berarti terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 26,10 ribu orang atau 0,19 persen.

Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah provinsi menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas utama. Hal ini terkait dengan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mewujudkan Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua.

k. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan secara perlahan selama periode 2007-2008 yaitu dari 12,57% di tahun 2007 menjadi 12,16% di tahun 2008. Penurunan angka TPT pada tahun 2008 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi pengangguran telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan ini didukung dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dari 3,84 juta orang pada tahun 2007 menjadi 4,19 juta orang di tahun 2008.

Berdasarkan komposisi lapangan pekerjaan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Mayoritas penduduk DKI Jakarta pada tahun 2008 bekerja di sektor perdagangan, restoran dan hotel sebanyak 37,11%, diikuti berturut-turut oleh sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 24,27 persen, dan sektor industri pengolahan 16,10%. Kondisi tersebut juga mencerminkan perekonomian DKI Jakarta jika dikaitkan dengan kontribusi sektoral pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di tiga sektor tersebut tidak hanya pada sektor formal tetapi juga pada sektor informal, seperti pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga, usaha kaki lima, dan usaha perseorangan di sektor jasa-jasa (reparasi/bengkel, penjahit, salon, dan sebagainya).

I. Angka Melek Huruf

Secara umum Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta relatif stabil sepanjang tahun 2007-2008. Pada tahun 2007, AMH penduduk DKI Jakarta sebesar 98,83% dan pada tahun 2008 sebesar 98,68%.

m. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan dasar cukup menggembirakan, kondisi ini memberikan indikasi bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun di DKI Jakarta cukup berhasil. Sekitar lebih dari 90% penduduk usia 7-15 tahun, yang merupakan "target goal" pemerintah dalam program ini, masih aktif bersekolah pada tahun 2008. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan pemberian dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu pada pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Sasaran Penerima BOP adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Luar Biasa Negeri (SDLBN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri

(SMPLBN). BOP dialokasikan untuk membiayai pengelolaan kurikulum, penunjang kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, pengembangan ketenagaan, kesiswaan dan ekstrakurikuler, peningkatan mutu, rumahtangga sekolah, daya dan jasa, ATK dan perlengkapan perkantoran, dan humas.

Sebagai konsekuensi program yang diselenggarakan oleh pemerintah maka APS tahun 2008 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2007 yang ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun yaitu dari 98,73% menjadi sebesar 98,83%, APS penduduk usia 13-15 tahun dari 90,36% menjadi sebesar 90,75%, dan APS usia penduduk 16-18 tahun dari 61,05 persen menjadi sebesar 63,54 persen. APS DKI Jakarta untuk semua kelompok umur di atas masih yang tertinggi dibanding dengan APS Provinsi lainya di Indonesia.

n. Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan penduduk di provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengalokasikan lebih dari 20 persen dari total APBD untuk pendidikan. Persentase ini melampaui angka yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas yaitu sebesar 20 persen.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat pula dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk menunjukkan peningkatan pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Penduduk usia 10 tahun ke atas (tahun 2007) di DKI Jakarta yang berpendidikan rendah (tidak sekolah/tidak tamat SD dan tamat SD) cukup besar, yaitu 32,86 persen.

o. Tingkat Kesehatan

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan penduduk di provinsi lain di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi dan usia harapan hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) DKI Jakarta tahun 2008 sebesar 8,2 bayi per 1.000 kelahiran. Angka tersebut turun, bila dibandingkan dengan AKB DKI Jakarta tahun 2007 yang sebesar 8,4 bayi per 1.000 kelahiran.

Tahun 2008, usia harapan hidup penduduk DKI Jakarta naik menjadi 75,9 tahun (perempuan 77,7 tahun dan laki-laki 74,2 tahun) dari 75,8 tahun (perempuan 77,6 tahun dan laki-laki 74,0 tahun) pada tahun 2007.

C. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, dan sesuai dengan visi dan misi dalam RPJMD 2007 – 2012 yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan, dengan fokus pada:
 - i. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengantisipasi dampak krisis;
 - ii. Penataan regulasi, kelembagaan dan pembiayaan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT;
 - iii. Pemantapan program pemberdayaan masyarakat;
 - iv. Peningkatan kelembagaan usaha skala mikro dan kecil.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial, dengan fokus pada:
 - i. Penyempurnaan regulasi pelaksanaan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - ii. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui BOP untuk tiap jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA);
 - iii. Peningkatan sistem jaminan kesehatan daerah;
 - iv. Pengembangan sistem jaminan sosial daerah.

- c. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan fokus pada:
 - i. Penyempurnaan regulasi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel utamanya aspek kelembagaan keuangan daerah;
 - ii. Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS melalui kontrak kerja dan tunjangan daerah;
 - iii. Penguatan kapasitas aparatur di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - iv. Peningkatan pelaksanaan *e-procurement*;
 - v. Peningkatan pelayanan terpadu (*front office* dan *back office*);
 - vi. Peningkatan pelayanan KTP mobile;
 - vii. Peningkatan uji coba model polisi komunitas (pemolisian masyarakat).
- d. Pembangunan sarana prasarana kota untuk memperlancar aktifitas perekonomian kota dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, dengan fokus pada:
 - i. Pengembangan sarana prasarana pengendalian banjir dan drainase;
 - ii. Pengembangan sarana prasarana transportasi;
 - iii. Pengembangan rumah susun sederhana.

Tabel 2.1 Identifikasi Isu Dan Masalah Mendesak Di Tingkat Nasional Dan Provinsi Tahun 2010

NO	URUTAN ISU DAN MASALAH MENDESAK	
	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
1	Pemeliharaan kesejahteraan rakyat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan
		a. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial
		a. Rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah SD, SMP dan SMA; b. Rehabilitasi dan pembangunan Puskesmas; c. Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan masyarakat dan Jaminan Sosial Masyarakat; d. Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK;
3	Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pendekatan pelayanan kepada masyarakat melalui lini terdepan (front liner) di tingkat kecamatan dan Kelurahan.
		a. Implementasi <i>e-procurement</i> ; b. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4	Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi	Pembangunan sarana prasarana kota untuk memperlancar aktifitas perekonomian kota dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat
		a. Banjir Kanal Timur; b. Pengembangan fasilitas pendukung pengoperasian kereta api lingkaran dalam kota (<i>loopline</i>); c. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan; d. Pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya;

5	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan kota sesuai prinsip pembangunan yang berkelanjutan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan pelaksanaan Car Free Day b. Pengembangan Program Green Building c. Pengembangan Program ITF d. Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lingkungan